

PENGARUH ASPEK FINANSIAL DAN KINERJA NON FINANSIAL TERHADAP OPINI AUDIT PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI REPUBLIK INDONESIA

Lina Fitriana¹, R. Nelly Nur Apandi², Agus Widarsono³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: linafitriana12@upi.edu¹, nelly.nna@upi.edu²

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :24-12-2024

Revised :09-01-2025

Accepted :20-01-2025

Keywords: Financial Aspects, NonFinancial Performanceand, Audit Opinion

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial aspects through balancing funds and capital expenditures and non-financial performance through the openness of public information systems, the level of corruption, and indications of dynastic political practices carried out by heads of district and city governments on audit opinions. The research design used a random sampling method with a sample of 84 district and city governments in Indonesia in 2023, and secondary data was obtained from the Audit Result Report of the Republic of Indonesia Audit Board. Hypothesis testing used logistic regression analysis. The results showed that balancing funds and capital expenditures did not have a significant effect on audit opinions, while public information disclosure also did not have a significant impact. On the other hand, the level of corruption had a significant effect on audit opinions, with regions with lower levels of corruption tending to get better audit opinions. Political dynasties showed a negative relationship to audit opinions, indicating that dynastic political practices can damage the accountability and transparency of regional finances. This study emphasizes the importance of strengthening internal control, transparency, and supervision in improving the quality of audit opinions in local governments.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek finansial melalui dana perimbangan dan belanja modal serta kinerja non-finansial melalui keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi, dan indikasi praktik politik dinasti yang dilakukan kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota terhadap opini

audit. Desain penelitian menggunakan metode random sampling dengan sampel 84 pemerintahan kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2023, dan data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sementara keterbukaan informasi publik juga tidak memberikan dampak signifikan. Sebaliknya, tingkat korupsi berpengaruh signifikan terhadap opini audit, dengan daerah yang memiliki tingkat korupsi lebih rendah cenderung mendapatkan opini audit lebih baik. Dinasti politik menunjukkan hubungan negatif terhadap opini audit, mengindikasikan bahwa praktik politik dinasti dapat merusak akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian internal, transparansi, dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas opini audit pada pemerintahan daerah.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, pemerintahan yang terbuka kepada rakyat lebih sah daripada yang tertutup (Faturrohman, 2017). Meskipun demikian, pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal (Wibawa, 2019). Minimnya keterbukaan informasi publik dapat merugikan kehormatan pemerintah (Benny, 2016) dan menimbulkan risiko kurangnya informasi keuangan di pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Kewajiban keterbukaan informasi publik kini menjadi kewajiban pemerintah di era reformasi.

Fenomena ini tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2022, yang menunjukkan bahwa 41 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari 541 laporan yang diperiksa, 38 daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 3 lainnya mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Masalah utama terkait penyajian laporan keuangan, khususnya pada akun aset tetap dan belanja modal. Contohnya, Pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya meraih WTP selama empat tahun berturut-turut, pada 2022 hanya mendapatkan WDP akibat temuan aset tetap senilai Rp3,43 triliun yang belum tercatat (Bisnis.com, 2022; BandungBergerak.id., 2023).

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik mendorong pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Menurut Mardiasmo (2002), keberhasilan otonomi daerah bergantung pada pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Salah satu cara mengurangi ketidakakuratan informasi keuangan adalah melalui audit, yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan data keuangan untuk menilai kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan. Pasal 23 ayat 5 UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas mengaudit pengelolaan

keuangan negara di tingkat pusat, daerah, dan lembaga lainnya, dengan mengutamakan profesionalisme, independensi, dan integritas (Sipayung & Wahyudi, 2022).

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, hasil audit adalah opini yang menyatakan kualitas laporan keuangan berdasarkan kewajaran informasi yang disajikan. Opini yang diberikan terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), sesuai dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. Pemerintah daerah harus memperhatikan empat komponen utama dalam pengelolaan keuangan: kesesuaian laporan keuangan dengan standar pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Diagram berikut menunjukkan perkembangan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dari 2018 hingga 2022.



Gambar 1 Perkembangan Opini LKPD 2018-2022

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Hingga tahun 2022, beberapa kabupaten dan pemerintah daerah masih memperoleh opini WDP, TW, dan Disclaimer, yang membatasi kemampuan mereka dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi hanya dapat tercapai jika didasarkan pada materi saji yang tepat. Materi saji terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Kekeliruan mengacu pada masalah perhitungan, estimasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi atau kegagalan dalam menindaklanjuti suatu tugas (Mulyani & Suryawati, 2011). Sementara itu, kecurangan merupakan situasi di mana informasi keuangan disajikan secara jelas namun bertujuan negatif, yakni untuk merampas kekayaan individu demi kepentingan pribadi (Soleman, 2013; Wells & Gill, 2007).

Penelitian oleh Widodo & Sudarno (2017) menyimpulkan bahwa temuan audit memengaruhi opini audit seluruh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Temuan audit, yang menunjukkan apakah suatu entitas sesuai dengan kriteria audit atau membutuhkan perbaikan, terdiri dari empat klasifikasi menurut Peraturan BPK No. 1. Pertama, kepatuhan terhadap standar akuntansi (PP No. 71, 2010). Kedua, kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai PSAP 05-09. Ketiga, kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan. Keempat, efektivitas sistem pengendalian internal. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek finansial dan non-finansial memengaruhi opini audit pemerintah daerah di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membawa dampak positif, seperti munculnya pusat ekonomi baru dan pemimpin berkinerja baik. Namun, masalah seperti jalan rusak, jembatan roboh, dan pengendapan dana transfer masih terjadi. Pemerintah daerah cenderung mengendapkan dana di perbankan, bukan untuk program prioritas, karena insentif kinerja yang kurang menarik, seperti Dana Insentif Daerah (DID) yang hanya 1,87% dari total transfer ke daerah (CNBC Indonesia, 2021).

Fenomena dana perimbangan menunjukkan ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi dana untuk desentralisasi. Pada 2021, dana perimbangan sebesar Rp 688,68 triliun mencakup DAU, DBH, dan DAK, yang diberikan tanpa persaingan dan didasarkan pada formula tertentu. Hal ini membuat banyak pemerintah daerah merasa nyaman dengan alokasi dana tetap, meskipun kinerja daerah tidak optimal. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan kebijakan dengan menambah insentif seperti Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendorong kompetisi dan pencapaian target kinerja (CNBC Indonesia, 2021).

Distribusi transfer fiskal yang tidak merata menjadi tantangan, dengan alokasi dana sering dipengaruhi kalkulasi politik, sementara kebutuhan daerah terabaikan. Hal ini menyebabkan wilayah yang membutuhkan lebih banyak dana tertinggal dalam pembangunan. Selain itu, infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah terpencil, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Data ASEAN Development Outlook (2023) menunjukkan banyak daerah ASEAN kesulitan mengakses infrastruktur dasar, memperlebar kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal. Oleh karena itu, distribusi fiskal perlu lebih adil dan efektif agar wilayah tertinggal mendapatkan dukungan finansial yang memadai.

Aspek finansial, menurut Rudyawan & Badera (2009), mempengaruhi opini audit yang diterima pemerintah daerah, yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian tujuan (Wulandari, 2015). Aspek non-finansial, seperti kualitas pelayanan publik, memberikan gambaran pengelolaan selain keuangan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh aspek finansial dan non-finansial yang memadai.

Dana perimbangan, yang mencakup DAU, DAK, dan DBH, bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan mendukung desentralisasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan yang efektif menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang baik, namun sering kali dana ini tidak sepenuhnya dialokasikan untuk program prioritas, memengaruhi kualitas pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 33, 2004, dana perimbangan diharapkan menciptakan keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip desentralisasi.

Pengelolaan aset adalah komponen penting dalam aspek finansial pemerintah daerah, mencerminkan kemampuan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Belanja modal, yang digunakan untuk meningkatkan nilai aset tetap seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan gedung sekolah, berperan signifikan dalam pengelolaan aset.

Menurut Mahmudi (2016), belanja modal meningkatkan nilai ekonomi aset yang digunakan dalam jangka panjang. Pengelolaan aset yang terstruktur dan terencana dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan (M. Suparmoko, 2016). Pengelolaan keuangan yang baik melalui belanja modal juga meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dan meningkatkan peluang memperoleh opini audit yang baik (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan belanja modal yang efektif dapat dilihat dari besarnya nominal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana yang mendukung ekonomi lokal. Semakin besar belanja modal, semakin baik dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Penelitian Sari & Mustanda (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja non-finansial berpengaruh signifikan terhadap opini audit, dengan indikator seperti akses informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti. Penelitian Transparency International (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan korupsi rendah memiliki laporan keuangan yang lebih baik, seperti Pemerintah Kabupaten Sleman yang meraih opini WTP berkat transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat.

Akses yang baik terhadap informasi publik, termasuk anggaran dan laporan keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 14, 2008b, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran daerah. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya dan penyelewengan tugas, yang berdampak pada alokasi sumber daya yang tidak efisien (Pratiwi et al., 2022).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih penghargaan Pemerintah Provinsi Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dengan nilai 93,94, naik peringkat dari 14 ke 8 nasional. Pencapaian ini berkat upaya empat tahun berturut-turut, didukung oleh perangkat daerah dan gubernur yang mendorong transparansi. Pemprov Kaltim juga membentuk PPID ramah disabilitas dan memanfaatkan teknologi digital melalui platform Satu Data Kaltim untuk mempermudah akses informasi. Meskipun demikian, Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan transparansi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa (Liputan6.com, 2023).

Akses informasi publik masih terbatas di banyak daerah, dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih dalam kategori "cukup-cukup saja" setelah 15 tahun UU KIP diberlakukan (Komisi Informasi Pusat, 2024). Kurangnya transparansi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

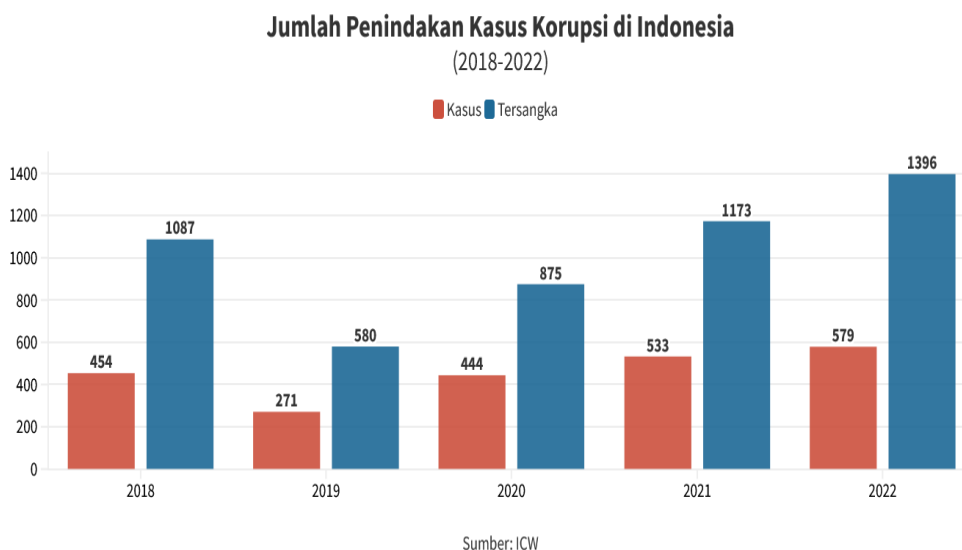
Akses yang baik terhadap informasi publik, seperti anggaran dan proyek, berkontribusi pada kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah yang transparan cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih baik, karena meningkatkan kepercayaan masyarakat (Pusat Studi Kebijakan Publik, 2022). Penelitian oleh Liu (2020) menunjukkan bahwa transparansi anggaran dan laporan keuangan berdampak positif

pada kualitas laporan keuangan, sementara penelitian oleh Masnila et al. (2022) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun transparansi informasi publik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) masih menghadapi tantangan besar terkait korupsi. Dari 2017 hingga 2022, TKD menyumbang 21%-37% dari belanja pemerintah, dengan ketergantungan daerah melebihi 50% dari pendapatan daerah. Fenomena ini membuka peluang penyalahgunaan, dengan 178 kepala daerah terjerat korupsi antara 2004-2022. Modus korupsi termasuk penyalahgunaan jalur aspirasi DPR dan intervensi pejabat dalam alokasi dana. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi, serta pengawasan yang lemah, menghambat ekonomi daerah dan daya saing (Hukumonline.com., 2023).

Pengelolaan keuangan negara di negara maju umumnya lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh tingkat korupsi yang lebih rendah dan penegakan hukum yang lebih kuat di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang sering mengalami tingginya tingkat korupsi dan penegakan hukum yang lemah, yang menghambat pengelolaan keuangan negara secara efektif, menyebabkan kebocoran dana, penyalahgunaan anggaran, dan penurunan kualitas layanan publik (Hasibuan, Dompok & Salsabilla, 2024).

Kritik terhadap kebijakan pembangunan pemerintah meningkat, terutama terkait korupsi yang masih meluas di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Transparency International (2021), Indonesia mendapat skor 38/100 pada Indeks Persepsi Korupsi (IKP) 2021, sedikit meningkat dari skor 37/100 pada 2020. Namun, peringkat ini masih di bawah rata-rata ASEAN, Asia-Pasifik, dan Komunitas G20, serta berada di bawah Singapura (85), Malaysia (48), dan Vietnam (39) (Djamil & Anggraini, 2023).



Gambar 2. Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia (2018-2022)
Sumber: DataIndonesia.id

Tingkat korupsi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun ada kepatuhan dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan, korupsi tetap terjadi, seringkali terkait dengan penyalahgunaan anggaran. Analisis kinerja keuangan daerah membantu menilai ketepatan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Penelitian oleh Priatnasari & Suhardjanto (2020) dan Kiswanto & Fitriani (2019) menunjukkan hubungan antara kasus korupsi dan kinerja keuangan daerah, yang dapat dianalisis melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemandirian dan tingkat investasi daerah dianggap berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Tabel 1 Data Tindak Pidana Korupsi Wilayah 2018-2022

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jawa	86	28	19	23	48
2.	Sumatera	56	40	29	43	19
3.	Sulawesi	5	3	7	8	8
4.	Maluku	5	-	-	4	5
5.	Kalimantan	10	16	6	5	11
6.	Bali	-	-	-	3	-
7.	Papua	3	2	1	-	9
8.	Kepulauan Tenggara	2	3	-	-	-

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Politik dinasti, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu keluarga, bergantung pada dukungan institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mempertahankan keberlanjutan. Anggota dinasti memiliki akses untuk mengontrol kebijakan dan sumber daya publik, yang sering digunakan untuk memperkuat posisi politik mereka. Di legislatif, mereka mempermudah pengesahan kebijakan yang menguntungkan keluarga, menciptakan distorsi pengelolaan publik. Dukungan yudikatif memberikan legitimasi kepada tindakan kontroversial, bahkan yang melibatkan korupsi. Studi menunjukkan bahwa politik dinasti mengurangi akuntabilitas dan memperburuk hasil pembangunan ekonomi (George & Ponattu, 2018; Querubin, 2016).

Praktik politik dinasti tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Jepang, yang memiliki jumlah politikus dinasti tertinggi keempat di antara negara demokrasi. Mantan Perdana Menteri Yoshihide Suga mengkritik politik dinasti, atau politik seshu, karena menghambat persaingan politik sehat dan masuknya bakat baru, serta menghalangi reformasi partai yang berkuasa. Beberapa pihak berpendapat bahwa politik seshu melanggar norma demokrasi karena posisi publik tidak seharusnya diwariskan dalam keluarga (Miwa, Kasuya & Ono, 2022).

Praktik politik dinasti dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Ketika daerah memiliki kemandirian tinggi dan ketergantungan pada pusat rendah, namun didominasi oleh politik dinasti, akuntabilitas keuangan meningkat jika kinerja pemerintah daerah baik (Saad & Trisha, 2020). Namun, politik dinasti sering terkait dengan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal, yang menghambat tata kelola yang baik. Hal ini berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Transparency International, 2022).

Politik dinasti dapat menghambat implementasi sistem informasi yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keputusan politis, bukan teknokratis, sering menghalangi penerapan sistem informasi yang andal, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat dan menurunkan kualitas laporan keuangan yang diaudit (Romney, Steinbart, & Cushing, 2020).

Praktik ini juga berdampak pada opini audit, di mana laporan keuangan di daerah yang terpengaruh politik dinasti cenderung disusun berdasarkan kepentingan politik, bukan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan memperoleh opini audit yang lebih baik, penguatan pengawasan, penerapan sistem meritokrasi, dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting.

Ramadhan dan Kustiawan (2022) dalam penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah menyimpulkan bahwa variabel-variabel finansial seperti pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel tersebut terhadap kinerja keuangan.

Agustino et al. (2021) dalam penelitian mereka mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran kunci dalam pemberantasan korupsi dengan kekuatan konstitusional yang mencakup penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan. Namun, KPK menghadapi berbagai ancaman dari elit politik yang berusaha melemahkan komisi ini, termasuk dengan mengubah regulasi atau bahkan membubarkannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, situasi ini menggambarkan tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi, yang dapat mempengaruhi opini audit, khususnya di daerah-daerah yang terpapar oleh praktik politik dinasti dan tingkat korupsi yang tinggi.

Sofia dan Syamsurizal (2010) dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil memiliki hubungan signifikan dengan Anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek finansial seperti pendapatan dan dana transfer berperan penting dalam menentukan alokasi anggaran belanja modal, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan transparansi keuangan daerah. Temuan ini relevan dengan topik penelitian mengenai pengaruh aspek finansial terhadap opini audit, yang

mencakup pengelolaan anggaran di pemerintah daerah.

Terdapat gap dalam penelitian mengenai pengaruh aspek finansial dan kinerja non-finansial terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada satu aspek saja, baik finansial maupun non-finansial, tanpa mempertimbangkan interaksi antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti secara simultan terhadap opini audit pemerintah daerah di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Dengan menggunakan data tahun 2023, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kontribusinya terhadap akuntabilitas serta transparansi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbaiki pengawasan, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan sumber daya publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian berupa analisis regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel independen yang meliputi dana perimbangan, belanja modal, keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti terhadap variabel dependen berupa opini audit pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia. Metode kuantitatif dipilih karena melibatkan statistik dalam analisis data dan pengukuran variabel dengan angka, sehingga lebih sistematis, terencana, dan terstruktur dari awal hingga akhir penelitian (Ahyar et al., 2020). Desain regresi logistik yang digunakan adalah binary logistic regression, mengingat variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel dummy. Populasi penelitian mencakup 508 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Republik Indonesia, dengan sampel yang dihitung menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan 84 sampel yang dipilih secara purposive. Data yang digunakan adalah data sekunder berbasis cross-sectional yang mencakup laporan keuangan tahun 2022 dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (<https://www.bpk.go.id/>), data sistem informasi publik dari situs web pemerintah daerah, tingkat korupsi dari situs resmi kejaksaan, serta data praktik politik dinasti dari riset Negara Institute yang divalidasi dengan berbagai sumber literatur. Pengumpulan data juga melibatkan sumber tambahan, seperti buku, jurnal, artikel, dan berita, untuk memberikan perspektif komprehensif dalam menganalisis hubungan antara variabel yang diteliti. Statistik deskriptif digunakan sebagai langkah awal untuk menyajikan karakteristik dasar dari variabel yang diteliti, memberikan pemahaman awal mengenai data sebelum dilakukan analisis lanjutan (Imam Ghozali, 2018). Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan opini audit sebagai variabel dependen. Dalam regresi logistik, uji Wald digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi masing-masing variabel independen, dengan tujuan mengetahui apakah variabel tersebut berkontribusi signifikan terhadap opini audit. Jika nilai p yang dihasilkan lebih kecil dari

0,1, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit (Field, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan regresi logistik binary dalam menganalisis data karena variabel dependen (opini audit) merupakan variabel dummy yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 atau 0, dimana nilai 1 untuk pemerintahan daerah kabupaten dan kot a yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2023 dan nilai 0 untuk pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang memperoleh opini selain dari wajar tanpa pengecualian (Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Disclaimer).

Pengujian Model

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terdapat tiga pengujian model yang harus dilakukan, di antaranya adalah pengujian keseluruhan model I (overall fit test model), koefisien determinasi (Nagelkerke R²), dan menilai kelayakan model regresi (Hosmer and Lemeshow's goodness of fit). Pengujian model tersebut dilakukan untuk menguji apakah model fit atau sesuai dengan data. Pengujian model tersebut berdasarkan data yang akan disajikan menggunakan alat pengolahan data Microsoft Excel dan Software Smart PLS Version 4.1.0.2

Pengujian Keseluruhan Model (overall fit test model) bertujuan untuk mengevaluasi apakah penambahan variabel independen ke dalam model dapat meningkatkan kecocokan model dengan data. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengujian ini adalah -2 Log Likelihood, yang menggambarkan tingkat ketidaksesuaian model terhadap data. Semakin kecil nilai ini, semakin baik kecocokan model. Hasil pengujian keseluruhan model sebelum dan sesudah ditambahkan variabel independen disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Pengujian Keseluruhan Model Sebelum Ditambahkan Variabel

	Independen			
	Deviance	AIC	BIC	df
Null model	89,818	91,818	94,249	83
Estimated model	81,140	93,140	107,725	78

Pada tabel 2 diatas Nilai Deviance sebesar 89.818 menggambarkan ketidaksesuaian model tanpa variabel independen. Model ini hanya mempertimbangkan rata-rata data tanpa memasukkan variabel penjelas. Nilai AIC (Akaike Information Criterion) dan BIC (Bayesian Information Criterion) masing-masing sebesar 91.818 dan 94.249 juga menunjukkan ketidakefisienan model dalam menjelaskan data. Setelah estimasi awal dilakukan dengan menambahkan beberapa parameter, nilai Deviance turun menjadi 81.140. Penurunan ini menunjukkan bahwa model menjadi lebih baik dalam menjelaskan data dibandingkan Null Model. Namun, karena belum memasukkan semua variabel independen, model ini belum optimal.

Tabel 3 Pengujian Keseluruhan Model Setelah Ditambahkan Variabel Independen

	Deviance	AIC	BIC	df
Null model	89,818	91,818	94,249	83
Estimated model	81,140	93,140	107,725	78

Pada Tabel 3 di atas, setelah variabel independen dimasukkan, nilai Deviance tetap sama (81.140), namun model kini mencakup seluruh parameter yang relevan, yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen membantu menjelaskan data lebih baik dibandingkan Null Model. Selain itu, nilai AIC dan BIC yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih efisien dan sederhana, sehingga dianggap lebih baik. Penurunan nilai Deviance, AIC, dan BIC ini mengindikasikan bahwa model regresi yang memasukkan variabel independen lebih cocok untuk data dibandingkan dengan Null Model, yang berarti variabel independen memberikan kontribusi signifikan terhadap kecocokan model (Gujarati & Porter, 2009).

Estimasi Parameter dan Interpretasinya (uji nagelkerke R²square) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai ini merupakan modifikasi dari Cox and Snell's R², yang disesuaikan untuk regresi logistik agar dapat memberikan interpretasi yang lebih intuitif, mirip dengan koefisien determinasi pada regresi linier. Semakin besar nilai Nagelkerke R², semakin tinggi proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Namun, nilai ini biasanya lebih rendah pada regresi logistik dibandingkan regresi linier karena sifat data biner pada variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Nagelkerke R²Square Aspek Keuangan

	Cox and Snell's R-Square	Nagelkerke's R-Square	McFadden's R-Square
Estimated model	0,001	0,002	0,001

Pada Tabel diatas, nilai Nagelkerke R² sebesar 0.002 menunjukkan bahwa variabel independen yang mewakili aspek keuangan hanya mampu menjelaskan 0.2% dari variabilitas opini audit, mengindikasikan pengaruh yang sangat kecil. Nilai Cox and Snell's R² dan McFadden's R² yang masing-masing sebesar 0.001 memperkuat kesimpulan ini, yang menunjukkan bahwa aspek keuangan, meskipun penting dalam pengelolaan keuangan daerah, memiliki kontribusi yang terbatas dalam menjelaskan opini audit.

Tabel 5 Hasil Uji Nagelkerke R² Square Aspek Non Keuangan

	Cox and Snell's R-Square	Nagelkerke's R-Square	McFadden's R-Square
Estimated model	0,092	0,140	0,091

Pada Tabel 5, nilai Nagelkerke R² sebesar 0.140 menunjukkan bahwa variabel non-keuangan mampu menjelaskan 14% variabilitas opini audit, jauh lebih besar dibandingkan aspek keuangan. Cox and Snell's R² dan McFadden's R² masing-masing 0.092 dan 0.091 juga mendukung temuan ini. Faktor-faktor non-keuangan seperti keterbukaan informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti lebih signifikan dalam memengaruhi opini audit, menunjukkan bahwa tata kelola, etika, dan kualitas SDM di pemerintahan daerah lebih berpengaruh daripada pengelolaan anggaran.

Tabel 6 Hasil Uji Nagelkerke R² Square Aspek Keuangan dan Non Keuangan

	Cox and Snell's R-Square	Nagelkerke's R-Square	McFadden's R-Square
Estimated model	0,098	0,149	0,097

Hasil uji Nagelkerke R² pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model yang menggabungkan aspek keuangan dan non-keuangan mampu menjelaskan 14.9% variabilitas opini audit. Meskipun Cox and Snell's R² (0.098) dan McFadden's R² (0.097) menunjukkan kontribusi yang terbatas, faktor-faktor non-keuangan seperti keterbukaan informasi publik, tingkat korupsi, dan praktik politik dinasti lebih signifikan dalam memengaruhi opini audit dibandingkan dengan aspek keuangan, yang hanya memberikan kontribusi kecil (0.002). Kesimpulannya, meskipun pengelolaan keuangan penting, faktor non-keuangan seperti tata kelola yang baik dan pengurangan risiko non-keuangan lebih berpengaruh dalam memperoleh opini audit yang lebih baik.

Pengujian Kelayakan Model Regresi (hosmer and lameshow's godness of fit) digunakan untuk menilai apakah model regresi logistik memiliki kecocokan yang baik dengan data observasi. Nilai signifikan (p-value) dari Hosmer and Lemeshow Test digunakan sebagai indikator kelayakan model. Jika nilai p-value > 0.1, maka model dianggap fit atau sesuai dengan data (Hosmer et al., 2013).

Tabel 7 Hosmer and Lemeshow's Godness of fit

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	.158	8	1.000

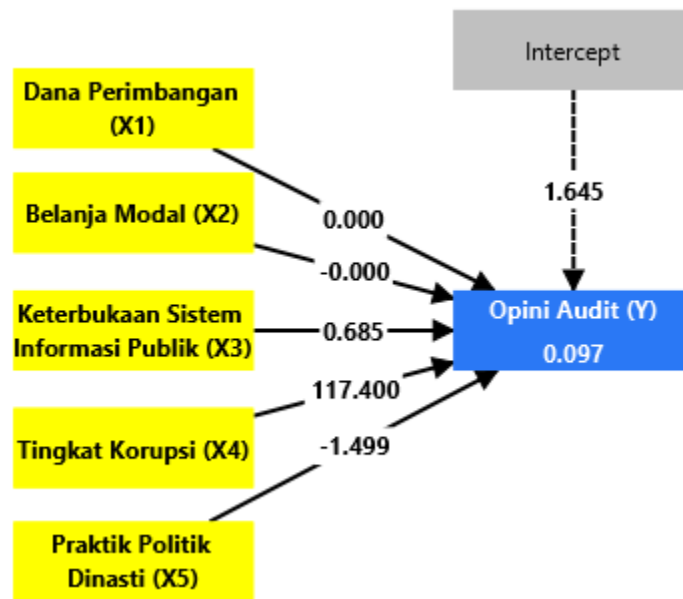
Hasil uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test pada Tabel 7 menunjukkan nilai Chi-square sebesar 0.158 dengan degree of freedom (df) 8 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 1.000, yang jauh di atas ambang batas 0.1. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0), yang menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara hasil prediksi model regresi logistik dan nilai observasi aktual, tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, model regresi logistik yang digunakan memiliki kecocokan yang baik dengan data, dan hasil prediksi model cukup akurat serta konsisten dengan data observasi. Nilai Sig. 1.000 menguatkan bahwa model ini dapat memprediksi nilai observasi dengan tepat, tanpa adanya bias atau ketidaksesuaian data. Model yang cocok ini memberikan dasar yang kuat untuk pengujian hubungan antara variabel independen (aspek keuangan dan non-keuangan) dan variabel dependen (opini audit) dengan tingkat keyakinan tinggi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, hasil uji ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan valid dan dapat diandalkan, sejalan dengan panduan Hosmer et al. (2013), yang menyatakan bahwa model dengan kecocokan yang baik menghasilkan hasil yang lebih valid dan dapat diandalkan.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh aspek finansial yang diproyeksikan oleh dana perimbangan dan belanja modal serta kinerja non-finansial yang diproyeksikan oleh keterbukaan sistem informasi publik, tingkat korupsi, dan indikasi praktik politik dinasti terhadap opini audit. Dalam regresi logistik, uji parsial dilakukan dengan uji Wald untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik Wald (t hitung) dengan t tabel. Kriteria pengambilan keputusan uji Wald adalah sebagai berikut: jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_1 ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen; jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_1 diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui nilai t tabel maka harus menghitung degree of freedom (df) terlebih dahulu dengan rumus $df = n - k - 1$. N adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen. Nilai t tabel pada df 78 (84-5-1) dengan alpha 10% adalah 1,2925. Sedangkan nilai t hitung atau nilai statistik wald diperoleh dari hasil regresi logistik. Selain membandingkan t hitung dan t tabel, pengaruh variabel independen terhadap dependen juga dapat dilihat dari nilai signifikansi dengan kriteria: Jika $p\text{-value} > \alpha$ (10%) maka tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya jika $p\text{-value} < \alpha$ (10%) maka hipotesis berpengaruh signifikan. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi logistik.

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis

	Coefficients	SE	z-statistic	Wald	P value	Exp(Coefficients)
Dana Perimbangan (X1)	0,000	0,000	0,057	0,003	0,477	1,000
Belanja Modal (X2)	0,000	0,000	-0,496	0,246	0,310	1,000
Keterbukaan Sistem Informasi Publik (X3)	0,685	0,559	1,226	1,502	0,110	1,985
Tingkat Korupsi (X4)	117,400	80,011	1,467	2,153	0,071	9,68265011868629E+50V
Praktik Politik Dinasti (X5)	-1,499	1,084	-1,383	1,914	0,083	0,223
Intercept	1,645	1,241	1,326	1,758	0,092	5,182



Gambar 3 Gambaran Singkat Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian hipotesis regresi logistik pada tingkat signifikansi 10%. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat diperoleh model persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\log(1 - PP) = 1,645 + 0,000(X1) + 0,000(X2) + 0,685(X3) + 117,400(X4) - 1,499(X5)$$

Koefisien regresi untuk variabel dana perimbangan adalah 0.000 dengan p-value sebesar 0.477, yang menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit karena $p > 0.10$. Nilai $\text{Exp}(\text{Coefficient})$ sebesar 1.000 menunjukkan bahwa perubahan dalam dana perimbangan tidak meningkatkan atau menurunkan probabilitas memperoleh opini audit yang baik, yang mungkin disebabkan oleh distribusi dana perimbangan yang rutin dan tidak mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Ghozali, 2018). Variabel belanja modal juga menunjukkan hasil serupa, dengan koefisien 0.000 dan p-value sebesar 0.310, yang berarti belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Meskipun belanja modal dianggap indikator pengelolaan aset, hasil ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran saja tidak cukup untuk menentukan kualitas laporan keuangan. Koefisien untuk keterbukaan sistem informasi publik adalah 0.685 dengan p-value 0.110, yang mendekati tingkat signifikansi 10%, meski tetap tidak signifikan. Nilai $\text{Exp}(\text{Coefficient})$ sebesar 1.985 menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi publik hampir menggandakan peluang memperoleh opini audit yang baik, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Variabel tingkat korupsi memiliki koefisien yang sangat besar, yaitu 117.400, dengan p-value 0.071, yang signifikan pada tingkat kepercayaan 10%, dan nilai $\text{Exp}(\text{Coefficient})$ sebesar $9.682\text{E}+50$ menunjukkan bahwa pengurangan tingkat korupsi secara drastis dapat meningkatkan peluang memperoleh opini audit yang baik, menegaskan bahwa korupsi merupakan hambatan utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien untuk praktik politik dinasti adalah -1.499 dengan p-value 0.083, yang signifikan pada tingkat kepercayaan 10%, dan nilai negatif ini menunjukkan bahwa praktik politik dinasti cenderung menurunkan peluang memperoleh opini audit yang baik, dengan $\text{Exp}(\text{Coefficient})$ sebesar 0.223, yang mencerminkan bahwa praktik politik dinasti dapat memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Nilai intercept sebesar 1.645 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, kecenderungan untuk memperoleh opini audit yang baik adalah sebesar 5.182 kali ($\text{Exp}(\text{Coefficient})$).

Pembahasan

Dana perimbangan, sebagai komponen utama dalam sistem keuangan daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal. Namun, berdasarkan analisis statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit, dengan nilai koefisien sebesar 0,000 dan p-value 0,477 ($>0,05$). Penelitian Suandani dan Astawa (2021) mendukung temuan ini, sementara Fadhila, Utamingtyas, dan Handarini (2024) mengemukakan bahwa meskipun pengaruh dana perimbangan tidak signifikan, kualitas pengelolaan dana perimbangan dapat dimoderasi oleh opini audit. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan dana perimbangan melalui pelatihan, penguatan pengendalian internal, dan transparansi

pelaporan keuangan, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat dan lembaga audit eksternal untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan.

Belanja Modal (X2) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Opini Audit, dengan koefisien 0,000 dan p-value 0,310, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam belanja modal tidak mempengaruhi opini audit secara langsung. Penelitian Herawati (2023) juga menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, meskipun kinerja keuangan yang baik sering dikaitkan dengan opini audit positif. Sari dan Mustanda (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun tidak menghubungkannya langsung dengan opini audit. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti kualitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan efektivitas pengawasan, lebih dominan dalam menentukan opini audit yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Keterbukaan sistem informasi publik, yang merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Meskipun hasil analisis menunjukkan koefisien positif (0,685) dengan p-value 0,110, keterbukaan informasi publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit. Penelitian Hakim dan Surya (2021) serta Aggatha et al. (2023) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi dapat meningkatkan persepsi positif, dampaknya terhadap opini audit tidak selalu signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat korupsi, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola keuangan yang lebih mendalam, yang mempengaruhi efektivitas keterbukaan informasi dalam memengaruhi opini audit.

Tingkat korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit, yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Imam Panji dan Dwi Cahyo Utomo (2023) menyimpulkan bahwa daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan opini yang lebih buruk. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien 117.400 dengan p-value 0.071, mengindikasikan bahwa penurunan tingkat korupsi secara signifikan meningkatkan peluang pemerintah daerah untuk memperoleh opini audit yang baik. Hal ini diperkuat oleh teori agensi, yang menyatakan bahwa korupsi terjadi akibat asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta oleh temuan Ningsih dan Haryanto (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan korupsi. Penelitian lainnya oleh Salwa Bakade dan Ratri Paramitalaksmi (2024) menyoroti bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi, yang tercermin dalam opini audit yang tidak wajar. Jeppesen (2019) dan Assakaf, Samsudin, dan Othman (2018) juga mengemukakan bahwa audit sektor publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi. Secara keseluruhan, kualitas audit, transparansi laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal yang baik memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat korupsi dan memperbaiki opini audit.

Dinasti politik, yang merujuk pada strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu, memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa praktik politik dinasti kepala pemerintahan daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit, dengan nilai koefisien sebesar -1,499 dan p-value 0,083 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik politik dinasti dapat merusak akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Politik dinasti seringkali memicu ketidakefisienan dan inefisiensi pemerintahan, serta dapat berkontribusi pada korupsi, seperti yang dijelaskan oleh Tadem dan Tadem (2016), yang menyoroiti bagaimana dinamika politik ini memperburuk politik dan korupsi. Dinasti politik juga dapat melemahkan demokrasi, sebagaimana disoroiti oleh Bragança & Rios (2015), yang mencatat bahwa meskipun politisi dinasti cenderung mengumpulkan lebih banyak dana untuk infrastruktur, hal ini tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi atau kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dipimpin oleh keluarga atau kelompok tertentu sering kali lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompok ketimbang tujuan publik. Penelitian Pratolo (2020) juga menambahkan bahwa meskipun dinasti politik dapat mempengaruhi orang dengan lebih besar dibandingkan calon lainnya, hal ini tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Di sisi lain, politik demokrasi, meskipun memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi, juga berperan dalam stabilisasi dan pengaruh positif terhadap pengelolaan ekonomi dan akuntabilitas pemerintahan (Asako et al., 2010; Mendoza et al., 2012). Namun, menurut penelitian Bimantara (2007), opini negatif tentang politik sering kali muncul ketika sistem hukum dan lembaga politik relatif lemah, yang dapat merusak kualitas pelaporan keuangan dan pemerintahan yang lebih transparan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor finansial dan non-finansial memiliki dampak yang berbeda terhadap opini audit pada pemerintahan daerah di Indonesia. Dana perimbangan dan belanja modal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap opini audit, meskipun keduanya berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi publik juga tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap opini audit, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti korupsi, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola keuangan. Sementara itu, tingkat korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit, di mana daerah dengan tingkat korupsi yang lebih rendah cenderung mendapatkan opini audit yang lebih baik. Dinasti politik, meskipun berperan dalam mempengaruhi opini audit, menunjukkan hubungan negatif, mengindikasikan bahwa praktik politik dinasti dapat merusak akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian internal, transparansi, dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas opini audit pada pemerintahan daerah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas opini audit pada pemerintahan daerah. Pertama, pengelolaan

dana perimbangan dan belanja modal perlu diperkuat dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk penguatan pengendalian internal dan transparansi laporan keuangan. Kedua, keterbukaan sistem informasi publik harus didorong lebih lanjut, namun dengan memastikan bahwa transparansi tersebut diimbangi dengan sistem pengawasan yang lebih efektif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, untuk mengurangi tingkat korupsi, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam menguatkan sistem pengendalian internal, memperbaiki tata kelola keuangan, dan melibatkan lembaga audit eksternal secara lebih aktif dalam memantau penggunaan anggaran. Terakhir, praktik politik dinasti yang dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi sebaiknya dihindari, dengan mendorong sistem pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis, dan berfokus pada kepentingan publik. Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk memperoleh opini audit yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Fitriani, I., Wicaksana, H. H., & Daelami, A. (2021). Corruption Eradication in Indonesia: The Experience of The Corruption Eradication Commission (KPK). *Journal of Governance*, 6(2), 231-243.
- Aggatha, N. P., Rahayu, S., & Inawati, W. A. (2023). The Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 307–316.
- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Asako, K., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2010). Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 11(2), 155–173.
- Assakaf, E. A., Samsudin, R. S., & Othman, R. (2018). Public sector auditing and corruption: A literature review. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 9, 129-140.
- BandungBergerak.id. (2023). *Catatan BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Bandung*.
- Benny, P. M. (2016). *Peran Humas Badan Pusat Statistik Sebagai Pengelola Manajemen Reputasi Di Era Keterbukaan Informasi Publik*.
- Bimantara, A. R. (2018). Politik Dinasti dan Implikasinya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(2), 123-135.
- Bisnis.com. (2022). *LHP BPK 2022: 41 laporan keuangan Pemda bermasalah*. .
- Bragança, A., & Rios, A. (2015). Political dynasties and economic development. *European Journal of Political Economy*, 39, 273–286.
- CNBC Indonesia. (2021). *Mengubah proporsi dana transfer memacu kinerja Pemda*.

- Fadhila, L., Utamingtyas, T. H., & Handarini, D. (2024). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah: Peran Belanja Daerah dan Dana Perimbangan dengan Opini Audit sebagai Moderasi*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1376–1388.
- Faturohman, D. (2017). Esensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Warga Negara Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Administrasi, Manajemen Dan Kependidikan*.
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage publications limited.
- George, S. E., & Ponattu, D. (2018). How do political dynasties affect economic development? Theory and evidence from India. *Harvard*. Available at: https://Scholar.harvard.edu/Files/Sid_dynasties_draft_10nov2018_0.Pdf.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Hakim, F., & Surya, R. (2021). *Keterbukaan Informasi Publik dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(4), 322–337.
- Hasibuan, Z. A., Dompok, T., & Salsabilla, L. (2024, September). Perbandingan Pengelolaan Kinerja Keuangan Negara di Negara Berkembang dan Negara Maju (Studi Kasus Indonesia dan Singapura). In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 6, pp. 78-87).
- Herawati, E. K. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2018–2023*. Telkom University.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Hukumonline. (2023). Kasus korupsi di pemerintah daerah: Tren penindakan oleh KPK. Diakses dari
- Hukumonline.com. (2023, March 8). *Risiko korupsi tinggi, KPK ungkap sejumlah masalah dana transfer daerah*.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in fighting corruption. *Public Administration Review*, 79(5), 699-711.
- Kiswanto, A. H., & Fitriani, N. (2019). The effect of audit results and financial performance on corruption level moderated by government size. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 250–259.
- Liu, Maria Susanti (2020), Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Liputan6.com. (2023, November 17). *Kaltim jadi pemprov informatif ke-8 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023*. .
- M Suparmoko. (2016). *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, (1st ed.). Penerbit Andi.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta*.

- Mardiasmo, M. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Publisher.
- Marshall B. Romney, Paul J. Steinbart, Scott L. Summers, & David A. Wood. (2020). *Accounting Information Systems* (15th Global Edition). Pearson.
- Masnila, N., Firmansyah, F., Febriantoko, J., Mayasari, R., & Said, J. (2022). Quality of Financial Reporting and Impact of GGG Implementation: Study on Local Government in Indonesia. *5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*, 12–19.
- Miwa, H., Kasuya, Y., & Ono, Y. (2023). Voters' perceptions and evaluations of dynastic politics in Japan. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(3), 671-688.
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2012). Inequality in democracy: Insights from political dynasties in the Philippines. *Social Science Research Network*.
- Ningsih, S. T. S., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4).
- Panj, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Studi empiris pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2).
- Pasal 23 ayat 5 UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 Ayat 5 (1945)*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1. (2017). *eraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah*.
- Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi, J. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Pratolo, S. (2020). Dinasti Politik dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 123-140.
- Priatnasari, M., & Suhardjanto, D. (2020). Akuntabilitas keuangan dan tingkat korupsi di pemerintah daerah: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 380-400.
- Priatnasari, Y., & Suhardjanto, D. (2020). Regional Financial Characteristics and Public Transparency Towards Frequency of Fraud in The Local Government. *Priatnasari & Suhardjanto, The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 201–214.
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11(2), 151–181.
- Ramadhan, M., & Kustiawan, M. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(06), 832-846.
- Rudyawan, A. P., & Badera, I. D. N. (2009). Opini audit going concern: Kajian berdasarkan model prediksi kebangkrutan, pertumbuhan perusahaan, leverage, dan reputasi auditor. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 129–138.
- Salwa Bakade, & Ratri Paramitalaksmi. (2024). Kelemahan sistem pengendalian internal dan pengaruhnya terhadap korupsi di sektor publik. *Jurnal Audit dan Pengawasan*, 7(1), 22-33.

- Sari, N. M. D. P. , & Mustanda, I. K. (2019). *Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. Udayana University.
- Saud, A., & Trisha, N. (2020). Pengaruh politik dinasti terhadap pengawasan internal dan tingkat korupsi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 5(3), 113-128.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323–14334.
- Sofia, A., & Syamsurizal, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Dan Kotamadya di Jawa Barat. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 2(2), 369-378.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pen cegahan fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74.
- Suandani, K. P., & Astawa, I. G. P. B. (2021). *Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(3), 728–739.
- Tadem, E. C., & Tadem, T. S. E. (2016). Political dynasties in the Philippines: Persistent patterns of political continuity. *South East Asia Research*, 24(3), 310–329.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*.
- Undang-Undang No. 14. (2008a). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*.
- Wells, J. T., & Gill, J. D. (2007). Assessing fraud risk. *Journal of Accountancy*, 204(4), 63.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234.
- Widodo, O. P., & Sudarno, S. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 153–161.
- Wulandari, R. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia* [Bachelor's thesis]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.